

RENJA 2024



BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat serta karunianya, Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dapat tersusun. Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) dimulai dengan usulan dari setiap Bidang dan juga dari Sekretariat. Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Tahun 2024). Selanjutnya Renja ini menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024

Kami menyadari bahwa Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 ini belum sempurna, untuk itu mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Diharapkan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 ini dapat diimplementasikan demi memenuhi indikator capaian yang telah disepakati oleh seluruh stakeholder dan termuat di dalam dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Manggarai Barat demi mewujudkan Mabar Bangkit menuju Mabar Mantap.

Labuan Bajo, 03 Januari 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Manggarai Barat



Maria Yuliana Rotok, MM

Pembina, IWa

Nip. :19810509 201001 2 016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024. Penetapan Kabupaten Manggarai Barat sebagai destinasi pariwisata super prioritas berdampak kepada meningkatnya investasi bidang pariwisata yang cukup signifikan. Meningkatnya investasi tersebut diharapkan berbanding tegak lurus dengan jumlah kunjungan wisatawan dan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah sangat mempengaruhi kemampuan fiskal Pemerintah Daerah dalam mendanai program dan kegiatan pada Tahun 2024. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2022 dengan mempertimbangkan:

- a. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD); dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- b. Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah;
- c. Rancangan Renja Perangkat Daerah;
- d. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
- e. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024, adalah:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 219);
24. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 76);
25. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 84 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 84);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 adalah untuk menjamin konsistensi di dalam Perencanaan dan Penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai tujuan organisasi, dan sebagai tolok ukur kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga didalam pelaksanaan program dan kegiatan khususnya di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah nantinya benar-benar dapat terarah, terukur dan tepat sasaran serta terkendali sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.

b. Tujuan

Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

1. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
2. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan, hukum, dan sistematika penulisan.

BAB 2. EVALUASI RENJA TAHUN 2024

Bab ini memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2023 dan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah

BAB 3. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memuat Tujuan Sasaran, Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024, dan Rancangan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

BAB 4. PENUTUP

BAB II.

EVALUASI RENJA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat secara yuridis terbentuk di tahun 2021 melalui Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023, berada pada posisi 91,24% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.1
Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggara Barat
Tahun Anggaran 2023

NO	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pajak Daerah	177.045.306.122	189.160.355.864	106,84
2	Retribusi Daerah	68.840.683.316	46.577.574.520	67,57
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.281.029.507	5.281.029.507	100,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	21.558.717.083	7.866.154.352	36,49
	Total	272.725.736.028	248.885.114.243	91,26

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2023 pencapaiannya adalah sebesar 91,26 %, belum mencapainya target ini dipengaruhi oleh beberapa indikator PAD yang tidak mencapai target, yaitu Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang SAH, sedangkan untuk indikator dari Pajak daerah realisasinya melampaui target yang ditetapkan dengan realisasi pencapaiannya sebesar 106,84 % dan untuk indikator Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan realisasi pencapaiannya sebesar 100 %. Beberapa faktor pendukung melampauinya taerget pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbaikan manajemen pungutan terhadap pajak daerah.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan daerah
3. Melakukan Perjanjian Kerja sama dengan pihak kejaksaan dengan membentuk SATGAS Optimalisasi penerimaan PAD.

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 46.577.574.520,97 atau sebesar 68 % dari target sebesar Rp.68.840.683.316,- .dari data tersebut menunjukkan bahwa Retribusi Daerah tahun 2023 mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena penerimaan retribusi jasa Umum, Retribusi jasa usaha dan Perijinan tertentu belum mencapai target dengan alasan sebagai berikut:

1. Penerimaan retribusi jasa Umum berupa pelayanan kesehatan di RSUD Komodo realisasinya masih rendah yakni Rp. 20.991.468.530,50 atau 64% dari target Rp. 33.000.000.000, hal tersebut disebabkan karena:
 - a) Kapasitas Ruang Perawatan/Pelayanan di RS. Komodo masih terbatas. Kapasitas ruang perawatan/layanan yg tersedia di Gedung Baru belum beroperasi secara penuh karena masih ada pekerjaan lanjutan Tahap dua Pembangunan Gedung Baru dan juga masih kurangnya tenaga baik tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan untuk mendukung Operasional Pelayanan terutama operasional layanan di Gedung Baru.
 - b) Masih ada pasien yg di rujuk ke RS. lain yg secara klinisnya dapat dilayani di RS. Komodo.
 - c) Jenis layanan yang ada masih terbatas. Masih ada layanan yg belum tersedia di RS.Komodo seperti layanan Mata, Orthopedi, THT dan jenis layanan lainnya
2. Penerimaan Perijinan tertentu (retribusi IMB/PBG) pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman masih rendah dari target Rp.22.000.000.000 yang terealisasi sebesar Rp.7.589.438.038,- atau 34 % hal tersebut disebabkan karena
 - a) Rekomendasi Persetujuan kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan dokumen lingkungan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

- b) Pertumbuhan investasi di manggarai barat sedang tumbuh setelah dilanda covid 19.
 - c) Proses persetujuan teknis yang dikeluarkan oleh BPN terlalu lama sehingga proses PBG menjadi terlambat
 - d) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah terkait sempadan pantai terhadap beberapa wajib pajak tidak lagi dipungut karena pemerintah daerah dinyatakan kalah dalam keputusan PTUN
3. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan masih Belum optimal Pelayanan Persampahan/Kebersihan sehingga realisasinya masih rendah sebesar Rp. 2.116.898.000,-atau 87 % dari target Rp.2.421.400.800,-
4. Penerimaan retribusi jasa usaha dari pelayanan tempat rekreasi dan olahraga Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan tidak mencapai target disebabkan karena:
- a) Obyek penerimaan retribusi mengalami penurunan sejak dikeluarkannya kebijakan TNK menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sebagai dampaknya adalah banyak aktifitas diving dan snorkeling yang tidak membeli tiket karena operator dive beralasan melakukan diving dan snorkling di wilayah TNK. Terhadap praktik ini, dinas tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa dive operator untuk membeli tiket karena tidak ada aturan yang mengikat setelah penarikan Perda Retribusi di TNK. padahal pada tahun 2022, KSOP menyumbang banyak PAD cukup besar, selain Cunca Wulang, Batu Cermin, Rangko, dan Puncak Waringin.
 - b) Jumlah Kunjungan berdasarkan Tiket terjual: 123.359; Wisatawan mancanegara sebesar 55.053 dan Wisatawan Nusantara 68.036. Jumlah kunjungan untuk Wisatawan Nusantara sebesar 55,37% sementara untuk Wisatawan Mancanegara sebesar 44,63%. Tentu ini sangat berpengaruh terhadap capaian target karena harga tiket untuk Nusantara (Nusantara dan lokal) sebesar Rp. 20.000 sementara untuk asing sebesar Rp.50.000.

5. Penerimaan Retribusi Jasa Usaha berupa Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan dan Retribusi Jasa Umum Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian masih rendah dengan target Rp.1.445.802.000 dan realisasi 837.329.280,- atau sebesar 58%, rendahnya pencapaian target disebabkan karena:

- a) Tidak semua pasar yang ada di kecamatan beroperasi setiap hari.
- b) Keterbatasan sumber daya manusia terutama tenaga penagih masih kurang.
- c) Masih banyak stand atau los dipasar yang belum terpakai, d. masih banyak usaha minuman beralkohol belum memiliki izin sehingga belum maksimal dalam melakukan penagihan.

Disamping itu berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat juga harus mengalami penyesuaian untuk mencapai indikator kinerja utama yang tercantum di dalam RPMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026. Evaluasi dilakukan terhadap pencapaian target Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Hasil Evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Tabel 2.1
Evaluasi RKPD Tahun 2023

No	Sasaran	Program/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja (K) dan Anggaran (Rp.) Renja OPD Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja (K) dan Anggaran (Rp.) Renja Tahun 2023 (Triwulan III)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun ...)		Tingkat Capaian (%) Kinerja (K) dan Anggaran (Rp) Renja Tahun 2023	
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8				10		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar		2.938.810.177		453.131.033		755.992.276		1.152.096.341		533.688.579		2.894.908.229	7.989.898.262		98,51	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			17.259.500	2	545.000		4.660.000	1			8.771.500		13.976.500	31.242.900		80,98	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	14.035.700														
						2		1	3.401.000	1,00	2.566.000		8.053.500	4,00	14.020.500	19.574.900	100	99,89	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,00	3.223.800														
				1 Dokumen	545.000			1 Dokumen	1.259.000	1 Dokumen	690.000	2 Dokumen	718.000		3.212.000	11.668.000		99,63	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.337.780.877		396.007.533		632.595.007		831.916.426		440.394.417		2.300.913.383	6.756.623.159		98,42	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	1.712.690.877,00														
				26 Orang/Bulan	343.531.338	26 Orang/Bulan	434.671.202	26 Orang/Bulan	643.676.426	26 Orang/Bulan	268.104.417		1.689.983.383		5.605.406.964		98,67		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20,00	625.090.000,00														
				3 Dokumen	52.476.195	3 Dokumen	197.923.805	3 Dokumen	188.240.000	3 Dokumen	172.290.000		610.930.000		1.151.216.195		97,73		
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			6.402.500		3.465.800	3 Dokumen	-		2.227.200				5.693.000	35.400.000		88,92	
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	6.402.500														
				3 Dokumen	3.465.800	3 Dokumen	-	3 Dokumen	2.227.200	3 Dokumen	708.000		6.401.000		35.400.000		99,98		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	0	0,00								-				
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	umlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20			0,00	0	-										
						0	0,00		-										
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			399.171.700		35.645.000		60.535.275		287.290.265		14.009.012		397.479.552	844.147.610		99,58	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	6.686.700,00														
				1 Paket	2.672.900	1 Paket	4.013.800								6.686.700	17.377.600		100,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	202.523.200,00														
						0,00	3.800.000	0	9.514.575	1 Paket	189.208.625				202.523.200	393.150.375		100,00	

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	61.860.000,00	3 Paket	8.900.000	3 Paket	35.892.500	3 Paket	17.067.500			61.860.000	114.634.200	100,00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	15.688.800,00	3 Paket	3.392.100	3 Paket	3.394.400	3 Paket	7.600.500	3 Paket	643.160	15.030.160	52.361.660	95,80
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	-	0	0,00	0	-	-	-	-	-	-	540.000	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 bulan	28.579.800,00	3 Paket	0,00	3 Paket	4.360.000	3 Paket	21.270.000		2.947.000	28.577.000	35.618.800	99,99
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	79.130.000,00	3 Laporan	16.630.000	3 Laporan	-	3 Laporan	52.143.640		9.326.852	78.100.492	224.142.375	98,70
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 bulan	609.700,00	3 Dokumen	250.000	3 Dokumen	-	-	-		359.000	609.000	2.229.600	99,89
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 orang	4.093.500,00	0	0,00	1	3.360.000	1	-	1	733.000	4.093.000	4.093.000	99,99
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			56.195.600		9.146.000		14.917.250		7.142.450		23.650.300	54.856.000	83.641.000	97,62
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	34.621.800,00	3 Laporan	4.100.000	3 Laporan	8.885.000	3 Laporan	2.200.000	3 Laporan	19.432.500	34.617.500	55.616.500	99,99
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.000.000,00	3 Laporan	0,00	3 Laporan	5.257.250	3 Laporan	4.253.100	3 Laporan	3.154.350	12.664.700	12.944.700	90,46
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.573.800,00	3 Laporan	5.046.000	3 Laporan	775.000	3 Laporan	689.350	3 Laporan	1.063.450	7.573.800	15.079.800	100,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			122.000.000		8.321.700		43.284.744		23.520.000		46.863.350	121.989.794	238.843.593	99,99
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	66.000.000,00		7.821.700		25.010.174		15.500.000	2 Unit	17.662.350	65.994.224	176.348.023	99,99
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	56.000.000,00	4,00	500.000	4,00	18.274.570	4	8.020.000	4	29.201.000	55.995.570	62.495.570	99,99
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			-		0,00							-	12.747.500	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah			-		0,00							-	12.747.500	

		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0	0,00									12.747.500		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah			1.676.601.435	110.286.000	295.401.000	262.106.000	1.001.352.400	1.669.145.400	4.184.713.481	99,56					
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				1.676.601.435,00	110.286.000	295.401.000	262.106.000	1.001.352.400	1.669.145.400	4.184.713.481	99,56					
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	182.909.900,00		4.730.000	1 Dokumen	1.818.000	1.320.000	174.771.000	182.639.000	245.620.800	99,85				
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	10 Dokumen	5.848.700,00						1.613.000							
						2 Dokumen	525.000	2	1.470.000	2 Dokumen	2.240.000	4	5.848.000	43.984.500	99,99			
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	72.905.000,00						8.244.000							
						3 Laporan	34.367.000	3 Laporan	28.610.000	3 Laporan	678.000	3 Laporan	71.899.000	205.685.150	98,62			
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	881	204.752.000,00						10.112.000							
						220 Unit	8.760.000	220 Unit	177.570.000	220 Unit	8.310.000	221 Unit	204.752.000	399.828.000	100,00			
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laproan	45.710.000,00						8.310.000							
						3 Laporan	10.500.000	3 Laporan	18.320.000	3 Laporan	8.545.000	3 Laporan	45.675.000	141.545.000	99,92			
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	423.334.635,00													
							3.400.000		14.960.000		15.675.000	1	386.771.000	420.806.000	883.587.862	99,40		
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	400,00	65.357.000,00													
						125	5.980.000	100	11.015.000	100	23.370.000	75	24.813.900	65.178.900	255.841.800	99,73		
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	27.457.300,00													
						3	8.150.000	3	8.960.000	3	5.300.000	3	4.826.700	27.236.700	27.236.700	99,20		
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	60	8.611.500,00													
						20	700.000	20	7.400.000	0	-	20	480.600	8.580.600	26.183.069	99,64		
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	355.535.200,00													
						3 Dokumen	27.016.000	3 Dokumen	1.901.000	3 Dokumen	23.728.000	3 Dokumen	300.261.600	352.906.600	1.071.029.100	99,26		
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12	19.328.600,00													
						3 Dokumen	3.800.000	3 Dokumen	5.490.000	3 Dokumen	8.960.000	3 Dokumen	1.073.600	19.323.600	80.063.600	99,97		
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	255.138.900,00													
						0	0,00	0	14.920.000		160.530.000	1 Dokumen	79.443.000	254.893.000	749.956.000	99,90		
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	9.712.700,00													
						3 Laporan	2.358.000	3 Laporan	2.967.000	3 Laporan	3.450.000	3 Laporan	632.000	9.407.000	54.151.900	96,85		
Rata-rata capaian kinerja(%)																		
Predikat kinerja																		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat yang tertuang dalam RPJMD Badan Pendapatan Daerah memiliki Tujuan yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan dinamis sedangkan sasarannya adalah terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Untuk Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Manggarai Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai.

Tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan tata pemerintahan Badan Pendapatan Kabupaten Manggarai Barat yang baik, bersih, dan profesional
- b) Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
 - Perencanaan pengelolaan pajak daerah
 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - Penagihan Pajak Daerah
 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Tabel 3.1 Rencana Kerja Dan Anggaran

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024	

Organisasi : Badan Pendapatan Daerah

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
Badan Pendapatan Daerah														
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN									
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH									
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggaral Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 1.376.683.000				Rp. 1.376.683.000	Rp. 206.668.237
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggaral Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 7.000.000				Rp. 7.000.000	Rp. 116.450.400
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggaral Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 111.450.900				Rp. 111.450.900	Rp. 187.653.960
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggaral Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 237.152.600				Rp. 237.152.600	Rp. 429.518.912
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggaral Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 217.499.800				Rp. 217.499.800	Rp. 260.946.875

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.182.644.342				Rp. 7.182.644.342	Rp. 2.777.451.610
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 584.160.000				Rp. 584.160.000	Rp. 515.970.000
5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah									
5	02	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.000.000				Rp. 3.000.000	Rp. 50.000.000
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 80.450.000				Rp. 80.450.000	Rp. 190.000.000
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.316.500				Rp. 3.316.500	Rp. 30.000.000
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 77.000.000				Rp. 77.000.000	Rp. 273.000.000
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 80.000.000				Rp. 80.000.000	Rp. 45.000.000
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 26.000.000				Rp. 26.000.000	Rp. 40.000.000
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.600.000				Rp. 3.600.000	Rp. 30.000.000
5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 38.007.800	Rp. 2.564.100			Rp. 38.571.900	Rp. 30.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Rp. 150.530.000				Rp. 150.530.000	Rp. 375.000.000	
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Rp. 7.400.000				Rp. 7.400.000	Rp. 30.000.000	
5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Rp. 270.194.000				Rp. 270.194.000	Rp. 40.000.000	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Rp. 500.000	Rp. 50.000.000			Rp. 50.500.000	Rp. 185.000.000	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Rp. 19.750.000				Rp. 19.750.000	Rp. 40.000.000	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Rp. 14.400.000				Rp. 14.400.000	Rp. 60.000.000	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Rp. 130.000.000				Rp. 130.000.000	Rp. 125.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 233.900.000				Rp. 233.900.000	Rp. 31.235.648
Jumlah									Rp. 13.433.113.177	Rp. 52.564.100			Rp. 13.485.677.277	Rp. 9.444.602.146
								Kab. Manggarai Barat,..... Kepala Badan Pendapatan Daerah						
								Maria Yuliana Rotok, MM NIP. 198105092010012018						

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024. Dengan adanya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 akan sangat membantu dalam penyusunan rencana perubahan anggaran sehingga lebih tepat untuk melaksanakan kegiatan yang diprioritaskan. Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah.

Selanjutnya semoga Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 ini dapat dijalankan dengan baik.

Labuan Bajo, 03 Januari 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Manggarai Barat



Maria Yuliana Rotok, MM

Pembina, IV/a

Nip. 19810509201001 2 016